BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan implikasinya pada Akuntabilitas, maka pada bagian akhir dari penelitian ini penulis menarik kesimpulan, sekaligus memberikan saran sebagai berikut

5.1 Kesimpulan

1. Pada umumnya Standar Akuntansi Pemerintahan Dinas Pemerintah Kota Bandung sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Namun jika dilihat dari Manajemen dalam hal ini berhubungan dengan Sumber Daya Manusia masih yang ada pada Dinas Pemerintah Kota Bandung belum memenuhi kriteria baik, karena terbatasnya Sumber Daya Manusia yang memadai dalam menangani pengelolaan dan pelaporan keuangan di pemerintah. Dan kekurangan SDM tersebut diimbangi dengan kurangnya pemahaman Sumber Daya Manusia yang ada pada Dinas Pemerintahan Kota Bandung mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan.
2. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Dinas Pemerintah Kota Bandung dapat dikatan cukup baik. Namun dilihat dari Kualitas Laporan Keuangan yang Relevan, dan Andal belum memenuhi kriteria baik. Di Dinas Pemerintah Kota Bandung masih ditemukan Kualitas Laporan Keuangan yang kurang memenuhi kriteria.

3. Akuntabilitas Dinas Pemerintah Kota Bandung sudah dikatan cukup baik. Namun jika dilihat dari Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan belum memenuhi kriteria baik. Karena belum menetapkannya indikator kinerja utama (IKU) baik pemerintah daerah maupun SKPDnya.
4. Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Dinas Kota Bandung. Standar Akuntansi Pemerintahan memberikan pengaruh sebesar 31,1% terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Dinas Pemerintah Kota Bandung. Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Akuntabilitas pada Dinas Kota Bandung dengan kontribusi atau pengaruh sebesar 55,0%. Standar Akuntansi Pemerintahan memberikan pengaruh sebesar 34,5% terhadap Akuntabilitas pada Dinas Kota Bandung. Kemudian Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memberikan pengaruh 50,2% terhadap Akuntabilitas pada Dinas Kota Bandung.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah telah terbukti membawa pengaruh yang positif terhadap Akuntabilitas, maka peneliti memberikan saran yang dapat dijadikan masukkan pada Dinas Kota Bandung.sebagai berikut :

1. Standar Akuntansi Pemerintahan pada Dinas Kota Bandung pada umumnya sudah dikatakan cukup baik. Namun jika dilihat dari

Manajemen dalam hal ini berhubungan dengan Sumber Daya Manusia masi belum memenuhi kriteria baik, karena tidak tersedianya Sumber Daya Manusia yang memadai dalam menangani pengelolaan dan pelaporan keuangan di pemerintah dan dirasakan Kurangnya tenaga akuntan. Dan kekurangan Sumber Daya Manusia tersebut diimbangi dengan Kurangnya pemahaman tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. bisa lebih diperhatikan kembali misalnya saja dengan penambahan Sumber Daya Manusia yang berkopeten. Dan mampu untuk menangani pengelolaan dan pelaporan keuangan dan mempunyai pemahaman yang luas mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan. Karena SDM yang memadai dan pengetahuan yang dimiliki oleh SDM sesuai dengan apa yang dibutuhkan maka akan Standar Akuntansi Pemerintahan akan leih berkualitas

2. Dalam Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Dinas Kota Bandung.pada umunya cukup baik. Namun dilihat dari Kualitas Laporan Keuangan yang Relevan, Andal belum memenuhi kriteria baik. Di Dinas Kota Bandung masih ditemukan Kualitas Laporan Keuangan yang kurang memenuhi kriteria. Oleh karena itu pihak Dinas Kota Bandung harus bekerja lebih keras lagi, salah satunya dengan pemenuhan kriteria yaitu indikator kinerja sasaran yang dapat diukur secara obyektif (menggambarkan hasil), relevan dengan sasaran yang diukur dan dapat menyajikan sebagian informasi mengenai pencapaian IKU (indikator kinerja utama), menyajikan sebagian informasi mengenai kinerja yang

telah diperjanjikan, kemajuan pencapain target jangka menengah. Dan Informasi yang disajikan harus digunakan untuk peningkatan kinerja evaluasi atas pemanfaatan LAKIP SKPD

3. Akuntabilitas Dinas Kota Bandung sudah dikatan cukup baik. Namun jika dilihat dari Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan belum memenuhi kriteria baik. Karena belum menetapkannya indikator kinerja utama (IKU) baik pemerintah daerah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah. Oleh karena itu pihak Dinas Kota Bandung harus menetapkan indikator kinerja utama (IKU) baik pemerintah daerah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah , sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan menteri Negara pendayagunaan aparatur Negara nomor:PER/09/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan indikator kinerja utama dilingkungan instansi pemerintah, dan tidak terdapat pedoman pengumpulan data kinerja
4. Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebaiknya lebih diperhatikan lagi, karena Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang baik maka bisa menngkatkan Akuntabilitas. Ketersediaannya Sumber Daya Manusia yang memadai merupakan salah satu faktor penting dalam rangka menunjang keberhasilan Standar Akuntansi Pemerintahan. Diharapkan dengan adanya Standar Akuntansi Pemerintahan dalam pembuatan laporan keuangan dapat meningkatkan kualitas, akurasi, konsistensi dalam pembuatan laporan keuangan.